



# Dermaga Pesiar Mangkrak

## Kian Angker



● NUSABALI/NANTRA  
GEDUNG terminal Dermaga Pesiar Tanah, Ampo mangkrak dan semakin angker.

Desa mengingatkan kepada warga yang sering berwisata memancing setiap sore di Dermaga Pesiar Tanah Ampo, agar hati-hati. Sebab, sering terjadi kasus aneh berbau mistis.

AMLAPURA, NusaBali  
Gagal melanjutkan pembangu-  
nannya melalui KPS (kerjasama  
pemerintah swasta), proyek jetty

ramdor tempat berlabuh sekoci di  
Dermaga Pesiar Pantai Tanah Ampo,  
Desa Ulakan, Kecamatan Manggis,  
Karangasem terbengkalai sejak

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015  
Hal : 8



Sumbungan - - -

tahun 2008. Kini, kondisi proyek yang sudah habiskan anggaran miliaran rupiah ini terbengkalai dan dipercayai semakin angker.

Sebab, lokasinya berada satu areal dengan Kuburan Desa Pakraman Tanah Ampo. Dermaga itu belum diplaspas, dan palinggih yang ada tanpa upacara. Konon, tiap malam Kejang Kliwon, sering ada suara-suara bocah gaib bermain-main, memukul-mukul benda sekitarnya. Kelian Desa Pakraman Tanah Ampo, I Gede Suyadnya, memaparkan hal itu di Amlapura, Rabu (30/9).

Apalagi, gedung terminal dan bangunan fasilitas lainnya, kondisinya gelap, jarang digunakan. "Dari awal lokasi Dermaga Pesiar Tanah Ampo itu memang angker. Makhluk halus penghuni pantai dan kuburan, sering menggoda warga saat memancing. Mau membuktikan, silakan saja datang memancing di dermaga itu," ujarnya.

Persoalan lainnya kata Suyadnya, 23 warga sebagai pemilik lahan yang sebagian lahannya jadi jalan lingkar, sisa lahan warga belum juga sertifikatnya terurus. Mulanya

pemerintah menjanjikan sertifikat gratis bagi lahan warga yang kena proyek jalan lingkar Dermaga Pesiar Tanah Ampo.

Mulanya pemerintah menjanjikan sertifikat tahun 2008, hingga tahun 2015 tidak jelas, gara-gara dipingpong Dinas Perhubungan dan Dinas PU. Sebab, selama ini warga masyarakat bayar pajak, sesuai luas tanah sebelumnya, karena belum ada pengurangan luas lahan, mengingat sertifikat yang baru belum terurus.

Beberapa pemilik lahan sempat mengeluhkan, belum tuntasnya sertifikat tersebut, yang kena proyek Pelabuhan Dermaga Pesiar dan masih tersisa: I Nyoman Osek, I Nengah Sudiasih, I Wayan Puger, I Ketut Natih, I Nengah Gina dan yang lain.

Pembangunan itu dilakukan sejak tahun 2006, tercatat 9 tahun belum tuntas. Biaya telah dihabiskan cukup besar, baik dari Pemprov Bali, dan pusat. Misalnya pematangan lahan Rp 10 miliar, membangun 177 meter dermaga tahap I Rp 28 miliar, 77 meter dermaga tahap II

Rp 32 miliar, jalan lingkar masuk dermaga masuk Rp 5 miliar, study kelayakan Rp 500 juta, pengadaan tanah gedung terminal Rp 2,625 miliar, pembangunan gedung terminal Rp 7,151 miliar, dan sebagainya.

Suyadnya mengingatkan kepada warga yang sering berwisata memancing setiap sore di Dermaga Pesiar Tanah Ampo, agar hati-hati. Sebab, sering terjadi kasus aneh. Misalnya, seorang peseda gayung, tiba-tiba nyelonong nyemplung ke bibir dermaga, harya sepeda gayungnya yang ditemukan, korban hilang tanpa bekas. Begitu juga yang sering bermain sepakbola di pantai, salah-salah ditelan ombak pantai selatan.

Secara terpisah, Kadis Perhubungan I Wayan Sutapa mengakui, belum ada kelanjutan pembangunan dermaga itu, walau berulang kali menteri Perhubungan dan DPR RI mengunjungi. "Rencana pusat membangun jetty ramdor, juga gagal karena kekurangan biaya. Dana di APBN tersedia Rp 2,7 miliar, sebenarnya menghabiskan Rp 3,7 miliar," katanya. **k16**



## Dewan Undang Pj Bupati untuk Jelaskan Dana Hibah

MANGUPURA, NusaBali

Rapat terbatas legislatif dan eksekutif di kantor DPRD Badung, Rabu (30/9) sekitar pukul 14.00 Wita, membahas soal dana hibah, belum juga ada jalan keluar. Padahal anggota dewan sangat berharap dana hibah untuk masyarakat dapat segera dicairkan. Sejak Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah turun, dewan dilanda waswas, karena hibah yang mereka fasilitasi terancam tidak bisa cair.

Penjabat Bupati (Pj) Badung I Nyoman Harry Yudha Saka hadir dalam rapat, didampingi Sekkab Kompyang R Swandika, dan sejumlah pejabat seperti dari bagian keuangan, bagian hukum. Sementara rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta, dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan.

Sunarta yang juga Bendesa Adat Abianbase, Kelurahan Kapal, Mengwi, langsung mengutarakan maksud mengundang eksekutif dalam rapat. "Kami di dewan berharap agar masalah hibah ini bisa cair, untuk itulah maksud rapat ini. Mohon ada kejelasan," katanya.

Sempat terjadi dialog serius antara legislatif dan eksekutif. Pasalnya, eksekutif belum bisa

memberi jawaban yang memuaskan dewan. Yudha Saka sebatas memberi sinyal hibah yang bisa dicairkan adalah hibah untuk banjar adat, desa adat, subak, PPK, koperasi, dan yayasan. Sedangkan untuk kelompok-kelompok di luar itu, seperti kelompok ternak, belum dapat dicarikan solusi, termasuk untuk pura, kelompok masyarakat, dan sekaa-sekaa. Penjelasan eksekutif itu membuat gerah anggota dewan. Ketua Komisi III Nyoman Satria mengaku galau dengan sikap eksekutif yang tidak memberi jawaban pasti. "Mohon dicarikan solusi terbaik, biar hibah bisa cair," harapnya. Hal senada juga dilontarkan rekannya anggota I Gusti Anom Gumanti. Ia bahkan menyoroti karena pemberian hibah ada batas limitnya.

Anggota lainnya, Nyoman Dirga Yusa, Nyoman Mesir, Gede Suardika juga ikut memberi kritik atas lambannya pencairan dana hibah. Menurut Dirga Yuda, sebagai anggota dewan punya beban psikologi terkait ngadatnya hibah ini. "Arahan Pak Sekda Provinsi dengan Pergub sudah bisa cair. Tapi kok ini tambah sulit," katanya. Sementara menurut Mesir,

persoalan hibah ini hanya ada di Badung, kabupaten lain hibah sudah cair seluruhnya. "Kami jangan ditakut-takuti. Memangnya hibah ini dimakan oleh DPR," ucapnya.

Nyoman Sentana, anggota dewan Komisi IV tersebut bahkan mengaku siap berurusan dengan hukum kalau hibah ini dikorupsi dewan. "Saya siap dikerangkeng demi rakyat," kata dia.

Yudha Saka menegaskan bahwa yang bisa dicairkan adalah hibah untuk banjar adat, desa adat, subak, PPK, koperasi, dan yayasan. Pihaknya masih akan melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin demi mengakomodir keinginan masyarakat dan dewan. "Yang mungkin bisa dilakukan proses pencairannya cuma itu. Tapi sesuai arahan provinsi, sudah menyiapkan peraturan gubernur, apabila pergub sudah disetujui Mendagri, maka akan dilanjutkan dengan perbup," tandasnya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang belum terakomodasi. Tetapi pihaknya menegaskan, masalah ini bukan saja persoalan di Badung saja tetapi seluruh Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan semua pihak, baik itu di tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat. **as**

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 2



## Dugaan Korupsi Bansos UPPO Bangli ✓ Ada Aliran Uang Rp 34 Juta ke Kadis P3 Bangli

DENPASAR, NusaBali

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan (P3) Bangli, Wayan Sukartana bersama beberapa anak buahnya dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dengan terdakwa Ketua Kelompok Tani Ternak Bina Winangun, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli, Nyoman Juniada. Dalam sidang terungkap ada uang Rp 34 juta yang mengalir dari terdakwa ke Kadis P3 melalui salah satu anak buahnya.

Dalam keterangannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (29/9) dengan majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing, saksi yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini mengaku tidak pernah melakukan monitoring terhadap program yang dijalankan ini. "Sudah ada tim teknis yang melakukan monitoring ini," ujar Sukartana. Namun Sukartana mengatakan jika dalam pengajuan pencairan dana pro-

gram UPPO, ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi terdakwa. Di antaranya sudah memiliki kandang, alat fermentasi, ternak sapi 35 ekor, sepeda motor dan pakan ternak. "Terdakwa belum memiliki alat fermentasi dan sapi. Tapi tetap saya rekomendasikan untuk pencairan dana ini sebesar Rp 340 juta," ujarnya.

Meski mengaku salah, namun majelis hakim tetap menyatakan jika Sukartana sudah menyalahi kewenangannya sebagai kepala dinas. "Anda tetap salah karena sudah merekomendasikan pencairan dana," ujar Beslin.

Majelis hakim juga sempat mengkonfrontir keterangan Koordinator Tim Teknis Pengembangan UPPO, Wayan Sadya yang mengaku sempat meminta uang Rp 34 juta untuk diberikan kepada Kadis P3, Sukartana. Namun, Sukartana yang kini menjabat sebagai Kadis Peternakan dan Perikanan (P2) Bangli ini langsung membantahnya. "Saya tidak pernah terima uang itu," ujarnya. rez

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 5



## Kejari Tahan Tersangka Korupsi KKP-E

Tersangka  
dugaan  
kasus Kor-  
upsi KKP-  
E saat  
berada  
di Kejari  
Gianyar,  
Rabu  
(30/9).



• NUSABALI/WILASA

GIANYAR, NusaBali

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Gianyar menjebloskan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) asal Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar, ke Rutan Gianyar, Rabu (30/9) sekitar pukul 12.00 Wita. Mereka yakni I Ketut Ludri dan I Made Astika alias Genep, selaku Bendahara dan Ketua Kelompok Tani Ternak Suar Sari di Banjar Penyabangan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar.

Penahanan tersebut setelah Tim Penyidik Kejari Gianyar dipimpin Kasi Pidsus Kejari Herdian Rahadi SH, menyatakan berkas kasus itu P21 (lengkap). Berkas diserahkan oleh Penyidik Polres Gianyar ke Kejari Gianyar, Rabu (30/9). Berkas diserahkan

Made Leneng, Kanit Lidik III Tipikor Polres Gianyar seizin Kasat Reskrim, AKP I Dewa Putu Gde Anom Danjaya, dan Kapolres Gianyar, AKBP Farman. "Karena fakta-faktanya kuat secara hukum, maka dua tersangka ini kami tahan. Tentu agar mereka tak kabur dan melenyapkan barang bukti," ujar Kepala Seksi

Pidsus Kejari Gianyar Herdian Rahadi SH.

Menurut Herdian, kasus dugaan korupsi itu terungkap mulai dari tersangka I Ketut Ludri (Bendahara kelompok) dan I Made Astika alias Genep (Ketua kelompok) mengajukan proposal Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) periode 27 Mei 2010 sampai dengan 27 Mei 2012 dengan tujuan untuk mengembangkan sapi dengan jumlah 50 anggota. Pengajuan kredit dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Payangan, akhirnya dicairkan sebesar Rp 998.650.000.

Kemudian kedua tersangka tersebut kembali mengajukan permohonan kredit untuk kedua kalinya yakni pada periode 29 Mei 2012 sampai 29 Mei 2014 dengan anggota 45 orang. Kemudian kredit disetujui sebesar 1.125.000.000.

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada saat pengajuan kredit mencantumkan anggota fiktif serta tandatangan anggota palsu. Akibatnya Negara mengalami kerugian sebesar Rp 252.624.738. **Isa**

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 6



## Pemkab Badung Serahkan Bonus Atlet Porprov



• IST  
Pj Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka (3 dari kiri) bersama Sekkab Kompyang R Swandika (4 dari kiri), Ketua Umum KONI Badung Si Putu Raka Arnaya dan Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta (kiri) saat menyerahkan bonus kepada para atlet, pelatih, dan official yang berprestasi pada ajang Porprov Bali XII tahun 2015 di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (30/9).

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung memberikan penghargaan berupa bonus/uang tali kasih kepada para atlet, pelatih, dan official yang berprestasi pada ajang Porprov Bali XII tahun 2015. Bonus diserahkan oleh Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka, di ruang Kriya Gosana, Puspem Mangupura Mandala, Rabu (30/9).

Penyerahan bonus yang dirangkikan dengan pembubaran Kontingen Badung pada Porprov Bali XII tersebut, dihadiri Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, Sekkab Kompyang R Swandika, Ketua Umum KONI Badung Si Putu Raka Arnaya, Ketua Kontingen Badung I Nyoman Sukirta, dan seluruh SKPD Kabupaten Badung.

Dalam sambutannya Yudha Saka menyampaikan, kontingen Badung telah berhasil menjadi kontingen terbaik sekaligus mentradisikan juara umum pada Porprov Bali XII di Singaraja. Ini berarti telah tercipta budaya unggulan di bidang olahraga selain budaya unggulan lain yang telah diraih Kabupaten Badung.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari suatu proses perjuangan yang

tidak mudah, panjang, dan sangat melelahkan, betapa gigihnya para pelatih dan official serta ketatnya perjuangan para atlet untuk mempertahankan juara umum untuk keenam kalinya," jelasnya.

"KONI agar segera melakukan evaluasi terhadap cabang olahraga yang mengalami penurunan prestasi. Selanjutnya dicarikan solusi yang memadai untuk mengatasi permasalahan pada masing-masing cabang. Kepada pengurus cabang olahraga, kami minta lebih intens lagi memberikan pendampingan kepada para atlet dan pelatih, sehingga benar-benar mampu menjadi fasilitator dan katalisator dalam melaksanakan pembinaan. Untuk para atlet dan pelatih kami harap tidak cepat berpuas diri, teruskan berlatih, berlatih, dan berlatih. Tanamkan terus spirit patriot atlet dengan semboyan Badung datang untuk menang, sehingga akan menambah keyakinan meraih kemenangan dengan cara-cara yang benar dan martabat," tegasnya.

Si Putu Raka Arnaya mengatakan, pada Porprov XII kontingen Badung untuk keenam kalinya berturut-turut kembali berhasil menduduki sing-

gasana juara umum dengan perolehan total medali, 143 emas, 107 perak, dan 98 perunggu. Pada Porprov Bali XI di Denpasar, kontingen Badung hanya memperoleh 132 emas, 86 perak, dan 96 perunggu. Namun demikian KONI akan melakukan evaluasi terhadap cabor-cabor yang kontribusi medalnya belum memenuhi harapan dan cabor yang sama sekali belum mampu merebut medali, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Porprov Bali XIII tahun 2017.

Ditambahkan, jumlah atlet peraih medali emas perorangan sebanyak 83 orang, beregu 275 orang. Peraih medali perak perorangan 67 orang, beregu 177 orang. Peraih medali perunggu perorangan 68 orang, beregu 119 orang. Jumlah pelatih dan official keseluruhan, manajer 28 orang, official 72 orang, dan pelatih 100 orang.

Bonus untuk atlet peraih emas nomor perorangan sebesar Rp 45 juta per orang, perak Rp 22,5 juta, dan perunggu sebesar Rp 10 juta. Sementara bonus untuk beregu disesuaikan dengan jumlah atlet dalam regu tersebut. Untuk bonus atlet peraih emas beregu dua orang masing-masing Rp 22,5 juta, sementara beregu antara 12 orang sampai 23 orang mendapatkan masing-masing Rp 8 juta. Kemudian untuk bonus peraih perak kategori beregu, jika dalam satu regu terdiri dari dua orang maka masing-masing orang mendapatkan Rp 11 juta, tetapi bila beregu terdiri dari 12-23 orang, maka bonus masing-masing atlet mendapat Rp 6 juta. Dan untuk bonus beregu peraih perunggu bila itu dua orang, masing-masing mendapatkan Rp 5 juta, sedangkan beregu bila lebih dari 12-23 orang bonusnya sebesar Rp 4 juta.

Kemudian untuk bonus pelatih yang atletnya meraih emas sebesar Rp 12 juta, untuk official Rp 7 juta. Dan para pelatih yang atletnya mendapatkan perak, bonusnya Rp 9 juta dan bagi official Rp 5 juta. Sedangkan untuk bonus pelatih yang atletnya meraih perunggu, sebesar Rp 7 juta dan official sebesar Rp 4 juta. @ as

Edisi : Kamis, 1 Oktober 2015

Hal : 2